



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ORGANISASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rahayu
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

Ayodhia G. L. Kalake

PIHAK PERTAMA,

Rahayu

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET KINERJA |
|------------------|--|-------------------|---|--------------------------|
| SK.1 | Terlaksananya Layanan Hukum yang Berkualitas | IKSK.1.1 | Indeks Reformasi Hukum | AA |
| | | IKSK.1.2 | Nilai JDIH Nasional | AA (86-100) |
| | | IKSK.1.3 | Persentase Layanan Advokasi Hukum | 100% |
| | | IKSK.1.4 | Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator | 90% |
| | | IKSK.1.5 | Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis dan Dievaluasi | 90% |
| | | IKSK.1.6 | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pendampingan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 100% |
| | | IKSK.1.7 | Persentase Penyelesaian Naskah Hukum (Non Peraturan) | 90% |
| SK.2 | Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Didukung ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas | IKSK.2.1 | Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN | Menengah (0,61 – 0,8) |
| | | IKSK.2.2 | Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian | 87.5% |
| SK.3 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Lincah, Profesional dan Kolaboratif | IKSK.3.1 | Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana | 100% |
| SK.4 | Terwujudnya Layanan Ketatausahaan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien | IKSK.4.1 | Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi | 100% |

| NO | RINCIAN OUTPUT (RO) | ANGGARAN |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Layanan Dukungan Manajemen Internal | Rp2.156.662.000,00 |
| 2 | Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal | Rp3.887.258.000,00 |
| JUMLAH ANGGARAN EFEKTIF*) | | Rp6.043.920.000,00 |

*) Jumlah Anggaran Efektif adalah Jumlah Anggaran Total Dikurangi Anggaran RO Khusus


Jakarta, 30 Januari 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan
Organisasi



Ayodhia G. L. Kalake



Rahayu


LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

| NO | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ RINCIAN KINERJA | JADWAL KELUARAN TRIWULAN | | | |
|----------|---|---|--------------------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| IKSK.1.1 | Indeks Reformasi Hukum | Penilaian Indeks Reformasi Hukum | - | - | - | ✓ |
| IKSK.1.2 | Nilai JDIH Nasional | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | - | - | ✓ | - |
| IKSK.1.3 | Persentase Layanan Advokasi Hukum | Terpenuhinya Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum, Fasilitasi, dan/atau Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | - | - | - | ✓ |
| IKSK.1.4 | Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Telah Diajukan Permohonan Harmonisasi Kepada Kementerian Hukum Berdasarkan Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Diajukan Oleh Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Surat Keputusan (SK) Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) dalam Satu Tahun Anggaran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IKSK.1.5 | Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis dan Dievaluasi | Hasil Peraturan Perundang-undangan di Lingkup Kementerian Koordinator yang Telah Selesai Dilakukan Analisa dan Evaluasi Berdasarkan Ketentuan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 oleh BPHN Kementerian Hukum | - | ✓ | - | ✓ |
| IKSK.1.6 | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pendampingan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Pendampingan, Fasilitasi, dan/atau Pengawasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan Oleh Unit Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Terhadap Jumlah Permohonan Pendampingan Peraturan Perundang-undangan yang Masuk ke Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi | - | - | - | ✓ |
| IKSK.1.7 | Persentase Penyelesaian Naskah Hukum (Non Peraturan) | Tersedianya Naskah Hukum yang Efektif Berkualitas Persentase Naskah Hukum Non Peraturan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan | - | - | - | ✓ |

| NO | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ RINCIAN KINERJA | JADWAL KELUARAN TRIWULAN | | | |
|----------|---|--|--------------------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| | | Pembangunan Kewilayahan yang Selesai Diproses | | | | |
| IKSK.2.1 | Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN | Tercapainya Indeks Sistem Merit | - | - | - | ✓ |
| IKSK.2.2 | Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian | Survei atau Kuesioner yang Diberikan Kepada Pegawai untuk Mengevaluasi Pengalamannya dengan Layanan Administrasi Kepegawaian | - | ✓ | - | ✓ |
| IKSK.3.1 | Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana | <p>Terselesaikannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kelas Jabatan yang Ditargetkan Selesai Pada Triwulan II 2026 2. Dokumen Anjab dan ABK yang Ditargetkan Selesai Pada Triwulan III 2026 3. Dokumen Peta Proses Bisnis yang Ditargetkan Selesai Pada Triwulan IV 2026 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| IKSK.4.1 | Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi | Terselesaikannya Laporan Kinerja, Laporan Arsip dan Persuratan, Laporan BMN dan Laporan Realisasi Keuangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Jakarta, 30 Januari 2026

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia,
dan Organisasi



Rahayu